

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Partai politik menjadi sebuah satu-satunya kendaraan politik dalam kehidupan politik modern yang demokratis. Sebagai suatu organisasi, partai politik menurut Maurice Duverger secara ideal dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan kompromi bagi pendapat-pendapat yang saling bersaing, serta “menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik secara absah (legitimate) dan damai”.¹

Pada umumnya dapat di katan bahwa tidak ada sistem politik yang berlangsung tanpa adanya partai politik. Suatu perkecualian pada sistem otoritarian dimana seorang raja yang hanya tergantung pada tentara atau polisi dalam melangsungkan pemerintahannya. Maka dengan begitu urgen dan kompleksnya kebutuhan sistem politik akan keberadaan partai politik dalam sebuah panggung politik, hal ini menimbulkan banyak dari kalangan cendekiawan dan para ahli politik membuat sebuah penafsiran dan definisi tentang apa dan bagaimana partai politik. Sehingga dalam menafsirkan dan mendefinisikan partai politik banyak menimbulkan pengertian yang berbeda-

beda. Beberapa ilmuwan melihat dari sudut pandang pragmatis dan beberapa yang melihat dari sudut pandang ideologis. Sehingga pada akhirnya tidak dapat ditemukan adanya konsensus di antara para ilmuwan politik untuk membuat satu definisi yang dapat memuaskan semua pihak:

Menurut Mark N. Hagopian batasan partai politik adalah "suatu organisasi yang dibentuk untuk mempengaruhi bentuk dan karakter kebijakan publik dalam kerangka prinsip-prinsip dan kepentingan ideologi tertentu melalui praktik kekuasaan secara langsung atau partisipasi rakyat dalam pemilihan". Pemahaman tentang partai politikpun menjadi sangat lokal disetiap negara-negara demokratis, karena pemahaman tersebut terkait dengan peraturan normatif yang berlaku di setiap negara sebagai intermediasi antara masyarakat dan negara sehingga bagaimana detail definisi serta bagaimana fungsi partai tersebut sangat terkait dan dipengaruhi oleh konstitusi atau Undang-Undang yang berlaku di negara tersebut agar kebutuhan akan sistem politik tersebut juga sesuai dengan kondisi negara, wilayah dan masyarakatnya. Bisa dikatakan bahwa sistem politik akan sedikit banyak mempengaruhi maju tidaknya suatu negara. Sistem politik sendiri dapat diartikan sebagai suatu mekanisme dari seperangkat fungsi, dimana fungsi-fungsi tersebut melekat pada suatu struktur-struktur politik, dalam rangka pelaksanaan dan pembuatan kebijakan yang mengikat masyarakat.

Sistem politik Indonesia telah menempatkan partai politik sebagai pilar utama penyangga demokrasi. Demokrasi menurut Diamon, Linz dan Lipset merupakan sistem pemerintahan yang harus memenuhi tiga elemen yaitu²: 1.) Kompetisi yang sungguh-sungguh dan meluas di antara individu dan kelompok-kelompok organisasi (terutama partai politik) untuk merebutkan jabatan-jabatan pemerintah yang mempunyai kekuasaan-kekuasaan yang efektif, pada jangka waktu yang reguler dan tidak melibatkan penggunaan daya paksa; 2.) partisipasi politik yang melibatkan sebanyak mungkin warga dalam pemilihan pemimpin atau kebijakan, paling tidak melalui pemilihan umum yang di selenggarakan secara reguler dan adil, demikian rupa sehingga tidak satupun kelompok yang di kecualikan; 3.) kebebasan sipil dan politik: kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan untuk membentuk dan bergabung kedalam organisasi, yang cukup menjamin integrasi kompetisi dan partisipasi politik.

Dari pendapat Diamon, Linz dan Lipset maka dapat di artikan bahwa partai politik adalah satu-satunya kendaraan politik yang dapat di pergunakan individu atau kelompok untuk meraih atau merebut kekuasaan dalam jabatan-jabatan pemerintah yang bersifat sah karena tanpa daya paksa, partai politik dalam ranah demokrasi memiliki andil yang sangat besar karena partai politik merupakan elemen paling dasar yang langsung bersentuhan dengan

masyarakat karena orang-orang yang berasal dari partai politik inilah yang nantinya akan dipilih oleh rakyat dan nantinya sebagai perpanjangan tangan rakyat dalam membuat sebuah kebijakan dan menyalurkan aspirasi rakyat. Maka dari itu bagaimana peran dan strategi partai politik agar mampu membawa kandidat yang di usungnya dapat menempati kursi-kursi dalam pemerintahan agar aspirasi masyarakat dapat tersalurkan.

Pemilu adalah sebagai syarat dan tolak ukur bagaimana suatu negara tersebut menganut dan menjalankan sistem politik yang berasaskan demokrasi, sebab dengan adanya pemilu maka kehadiran partai politik sebagai satu-satunya kendaraan politik untuk mengusung kandidatnya sebagai lidah penyangkut rakyat hak-haknya dapat di akui, jika di ibaratkan pemilu adalah sebuah medan pertarungan, dan partai politik lainnya adalah musuh dalam pertarungan tersebut, kemudian suara konstituen sebagai pemilih menjadi alasan pertarungan itu terjadi, maka sudah semestinya partai politik berlomba untuk meraih suara-suara pemilih dengan maksimal mungkin dan hal ini membutuhkan penggunaan strategi dan taktik yang baik dan efektif.

Strategi sangat dibutuhkan setiap partai politik. Strategi merupakan suatu alat yang sangat fundamental sebab strategi sebagai alat yang dirancang untuk mencapai tujuan yaitu untuk memenangkan dalam sebuah pertarungan politik oleh partai politik, atau secara langsung oleh seseorang kandidat baik legislative atau kepala daerah yang menghendaki kekuasaan dan pengaruh

sebesar-besarnya di tengah-tengah masyarakat sebagai konstituen, dalam strategi politik. Sehingga dalam hal ini harus banyak orang yang berada di partai politik tersebut, yang mampu menyumbangkan pandangan dan pemikiran positif terhadap partainya. Sehingga, strategi partai baik kampanye, koalisi, rekrutmen, pencitraan dan konsolidasi berjalan efektif. Strategi-strategi tersebut menjadi kunci utama dalam "memenangkan" suara rakyat di dalam sebuah pemilu.

Pasca jatuhnya rezim orde-baru yang di pimpin oleh Presiden Soeharto pada tanggal 21 mei 1998, dan di bukanya kehidupan kepartaian politik sebagai langkah awal reformasi oleh Presiden Habibie, kondisi politik yang sebelumnya beku kemudian mencair. Dinamika politik menjadi terbuka dan bebas hal ini dampak dari diterapkannya kembali sistem "multi partai" pada saat itu, karena tidak ada lagi rezim orde-baru yang menghalang-halangi untuk melakukan ekspresi politik. Dampak dari penerapan kembali sistem multi partai tersebut sangat signifikan di lihat dari segi jumlah partai yang sebelumnya pada orde-baru yang hanya terdapat 3 Partai politik (Golkar, PPP dan PDI) bekekembang menjadi 141 partai politik namun hanya 48 partai politik yang lolos dan dapat mengikuti pemilu pada tahun 1999. Jumlah partai politik di Indonesia begitu mengembang dan menjamur ketika masa reformasi dimulai, hal ini disebabkan pada masa orde-baru jumlah partai politik sangat dibatasi. Sehingga *euphoria* akan kebebasan dari kekangan di masa orde-baru

yang selama ini di pendam, hal ini yang menjadi semangat untuk mendirikan partai politik sebagai wadah untuk berpartisipasi dan menyalurkan aspirasi.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan) adalah salah satu partai politik yang sampai saat ini masih terjaga eksistensinya, hal ini dapat di lihat karena secara skalan nasional PDI-Perjuangan selalu masuk dalam urutan tiga besar pada setiap di selenggarakannya pemilu di Indonesia, sejak dimulainya pemilu secara terbuka pada 1999 hingga saat ini. PDI-Perjuangan sendiri secara langsung memilik tali sejarah yang sangat erat kaitannya dengan partai-partai pada massa orde-lama karena embrio PDI-Perjuangan berasal dari kelanjutan Partai Demokrasi Indonesia yang berdiri pada tanggal 10 Januari 1973, yang terbentuk dari hasil 5 (Lima) fusi, yaitu partai politik yaitu PNI, Parkindo, Partai Katolik, IPKI dan Partai Murba. Kemudian Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di lanjutkan dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan) yang secara *factual* berdirinya PDI-Perjuangan di dideklarasikan 14 Februari 1999.

Sejak di laksanakan pemilu terbuka pertama pasca reformasi pada tahun 1999 dan untuk kali pertama PDI-Perjuangan di bawah pimpinan Megawati Soekarno Poetri sebagai peserta pemilu. Dalam pemilu 1999 PDI-Perjuangan mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat dan mampu memperoleh peringkat pertama untuk suara DPR dengan memperoleh 153 kursi (33,74%) setelah mendapat 35.689.073 suara (33,12%). Meskipun

demikian, PDI-Perjuangan gagal dalam membawa Megawati Soekarno Putri ke kursi kepresidenan, karena untuk menduduki kursi presiden pada masa itu masih menggunakan demokrasi keterwakilan untuk kursi Presiden dan wakil Presiden. Meskipun suara PDI-Perjuangan yang di gawangi Megawati Soekarno Putri memiliki suara mayoritas tidak dapat menghantarkannya ke kursi kepresidenan hal ini di sebabkan kalahnya dalam voting Sidang Umum MPR 1999 dari Abdurrahman Wahid, namun Megawati masih dapat menduduki kursi wakil presiden. Dan setelah setelah Abdurrahman Wahid dilengserkan dari kursi jabatan presiden pada tahun 2001, maka PDI-Perjuangan berhasil menempatkan Megawati ke kursi presiden. Pada Pemilu Legislatif 2004, perolehan suara PDI-Perjuangan mengalami penurunan pada peringkat kedua, dengan memperoleh 109 kursi (19,82%) setelah mendapatkan 21.026.629 suara (18,53%). Dalam pemilu anggota legislatif 2009 PDI-Perjuangan memperoleh 95 kursi (16,96%) di DPR setelah mendapat 14.600.091 suara (14,0%). Dengan hasil ini PDI-Perjuangan menempati posisi ketiga dalam perolehan suara serta kursi di DPR. Untuk pemilu presiden PDI-Perjuangan menempati pada posisi kedua. Meskipun hasil perolehan suara PDI-Perjuangan menurun pada setiap pemilu akan tetapi PDI-Perjuangan masih mampu menunjukkna eksistensinya karena selalu berhasil masuk dalam tiga besar dalam daftar perolehan suara terbanyak. Eksistensi yang di capai PDI-Perjuangan dalam mendapatkan dukungan dan simpati dari rakyat sebagai konstituenya tidak hanya pada pemilu legislatif

dan pemilu presiden akan tetapi juag pada ranah pilgub dan pilkada, hal ini dapat di lihat bagaimana PDI-Perjuangan mampu menempatkan kandidatnya sebanyak 43 persen pilgub dan pilkada di seluruh indonesia.

Jika dilihat maka basis utama suara dari PDI-Perjuangan terletak pada wilayah jawa tengah, bali dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Karena pada tiga wilayah tersebut perolehan suara PDI-Perjuangan selalu mendominasi pada jalannya pemilu. Namun dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk di teliti. Wilayah Daerah Istimewa yogyakarta sendiri adalah salah satu basis suara PDI- Perjuangan yang sampai saat ini kantong-kantong suara PDI-Perjuanga selalu mendapat suara mayoritas dalam setiap pemilu. Eksistensi awal dari keberhasilan PDI-Perjuangan di Daerah Istimewa Yogyakarta terbukti setelah berjaya “memerahkan” Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pemilihan umum pasca reformasi yaitu pada pemilu 1999 PDI-Perjuangan berhasil memenangi semua daerah pemilihan di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan perolehan suara mencapai 35,65 persen dari total suara sah karena memenangi seluruh lima kabupaten dan kota. Kemudian di lanjutkan oleh PAN pada posisi kedua dengan total perolehan suara 17,27 persen. Dengan demikian maka dapat di lihat bagaimana PDI-Perjuangan berhasil menunjukkan eksistensinya dan berhasil dalam menempatkan kader-kadernya pada kursi legislatif di lima wilayah Daerah Istimea Yogyakarta.

Tabel 1.1

Perolehan Suara Lima besar Pada pemilu 1999

No	Nama Partai	Kota Yogyakarta	Bantul	Sleman	Gunung kidul	Kulon Progo	Jumlah	%
1	PDI-P	97.972	148.558	189.527	134.586	72.559	643.202	35,65
2	PAN	59.108	80.063	100.832	38.152	33.464	311.619	17,27
3	GOLKAR	27.438	52.850	61.762	79.797	36.898	258.745	14,34
4	PKB	11.290	87.364	73.069	43.517	42.000	257.240	14,26
5	PPP	12.430	25.138	27.601	12.131	10.565	87.865	4,87

Sumber: diolah dari data perolehan suara Pemilu 1999 KPUD DIY

Kemudian hegemoni pencapaian PDI-Perjuangan berlanjut pada Pemilu 2004, meskipun satu daerah pemilihan yaitu Kabupaten Gunung Kidul terlepas dari rangkulan partai. Akan tetapi secara umum perolehan suara terbanyak di tingkat provinsi tetap dikuasai oleh PDI-Perjuangan dengan total perolehan suara 26,30 persen. kemudian masih di lanjutkan kembali oleh PAN dengan total perolehan suara 18,57 persen, dan masih pada posisi ketiga yaitu Golkar yang memperoleh 13,87 persen. Kejayaan partai tersebut berlanjut pada pemilihan kepala daerah. Dari lima kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, tiga di antaranya berhasil dimenangi bupati betahan (*incumbent*) yang berasal dari PDI-Perjuangan, yaitu Idham Samawi (Bantul), Ibnu Subiyanto (Sleman), dan Toyo S Dipo (Kulon Progo).

Tabel 1.2

Perolehan Suara Lima besar Pada pemilu 2004

No	Nama Partai	Kota Yogyakarta	Bantul	Sleman	Gunung kidul	Kulon Progo	Jumlah	%
1	PDI-P	59.758	151.336	104.288	99.839	49.840	465.061	26,30
2	PAN	52.848	80.218	99.216	56.761	39.197	328.240	18,57
3	GOLKAR	23.804	37.098	50.610	99.563	34.091	245.166	13,87
4	PKB	6.539	54.655	47.644	3.136	16.372	183.097	10,36
5	PPP	24.990	32.362	47.644	16.802	16.372	138.170	7,82

Sumber: diolah dari data perolehan suara Pemilu 2004 KPUD DIY

Meskipun pada pemilu legislatif 2009 partai PDI-Perjuangan secara keseluruhan di Daerah Istimewa Yogyakarta masih tetap mendapat suara terbanyak atau mayoritas, namun di beberapa wilayah PDI-Perjuangan gagal dalam mengusung kandidatnya untuk menduduki kursi legislatif dan bupati wakil bupati di beberapa wilayah tersebut, karena kantong-kantong suara PDI-Perjuangan tidak mampu lagi untuk di pertahankan di beberapa daerah pemilihan. Meskipun PDI-Perjuangan mengalami penurunan suara untuk mengusung calonnya dalam pileg di dua daerah di yaitu Gunung Kidul dan Kulon Progo, namun PDI-Perjuangan masih dapat mempertahankan suaranya pada tiga wilayah pemilihan pileg dan menempatkan kandidatnya pada kursi legislatif yaitu pada tiga wilayah kabupaten Bantul, Sleman dan kota Yogyakarta masih dapat di pertahankan oleh PDI-Perjuangan. PDI-Perjuangan juga berhasil mengusung calonnya di pemilihan pada empat

kabupaten yaitu Sleman, Bantul, Kota Yogyakarta dan wilayah Kulon Progo. Jika dilihat dari pemilu 2009 yang menjadi pesaing dari PDI-Perjuangan tidak lagi partai yang berbasis agama yaitu PAN, akan tetapi Partai Demokrat (PD) yang mengalami kenaikan suara yang cukup signifikan dengan perolehan total suara 16,54 persen yang sebelumnya tidak masuk dalam lima besar perolehan suara pemilu 2004 di Yogyakarta, PAN yang biasa memperoleh suara total kedua di bawah PDI-Perjuangan turun posisi menjadi nomor tiga dengan total perolehan suara 13,46 persen.

Tabel 1.3

Perolehan Suara Lima besar Pada pemilu 2009

No	Nama Partai	Kota Yogyakarta	Bantul	Sleman	Gunung kidul	Kulon Progo	Jumlah	%
1	PDI-P	42.554	106.435	84.378	67.633	32.320	333.320	18,98
2	PD	50.405	72.189	76.120	62.716	29.122	290.552	16,54
3	PAN	26.414	50.879	57.456	66.963	34.678	236.390	13,46
4	GOLKAR	15.800	41.126	49.784	49.255	24.743	180.708	10,29
5	PKS	23.118	46.346	63.806	21.314	22.061	176.645	10,06

Sumber: diolah dari data perolehan suara Pemilu 2009 KPUD DIYD

Dilihat dari berbagai prestasi perolehan suara yang di capai PDI-Perjuangan baik secara skala nasional maupun daerah, maka dapat di katakan bahwa PDI-Perjuangan adalah partai yang kuat karena sampai saat ini mampu menjaga eksistensi basis suara partainya pada setiap pemilu dari tahun ke tahun baik pusat maupun daerah, meskipun mendapat ancaman dari partai

politik lain sebagai lawan politik. Pencapaian yang di peroleh PDI-Perjuangan tentunya tidak berbuah dengan sendirinya, akan tetapi dengan usaha-usaha dan strategi yang sangat kompleks dan matang, yang telah di jalankan partai. Hal ini menarik untuk diteliti mengingat begitu pentingnya sebuah strategi bagi partai politik sebagai upaya-upaya untuk memperoleh suara konstituen dalam setiap pemilu, hal ini lah yang sangat menarik untuk diteliti sebagai topik penelitian. *“Bagaimana Strategi Dewan Pimpinan Daerah PDI-Perjuangan Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Menjaga Basis Suara Pada Pemilu 1999-2009”* yang selama ini adalah sebagai wilayah basis suaranya, Mengingat dari setiap pemilu PDI-Perjuangan selalu memperoleh suara mayoritas di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Masalah yang di angkat sebagai isu pokok permasalahan cenderung dalam ruang lingkup yang luas dan mendalam. Sehingga dari latar belakang diatas maka penulis mencoba membuat suatu perumusan masalah sebagai berikut.

“Bagaimana Strategi Dewan Pimpinan Daerah PDI-Perjuangan Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Menjaga Basis Suara Pada Pemilu 1999-2009”

C. Tinjauan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Menjelaskan strategi-strategi yang dilakukan Dewan Pimpinan Daerah PDI-Perjuangan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menjaga basis suara di setiap pemilu.
- b. Untuk mengetahui kegiatan-kegiatan yang dilakukan Dewan Pimpinan Daerah PDI-Perjuangan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menjaga basis suara pada pemilu 1999-2009.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah kepustakaan ilmu politik.

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu acuan untuk pedoman Dewan Pimpinan Daerah PDI-Perjuangan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menyongsong pemilu 2014 nantinya.

D. Kerangka Dasar Teori

Kerangka dasar teori merupakan dasar dalam sebuah penelitian yang menjadi acuan atau pedoman untuk mengungkapkan segenap macam permasalahan dengan menggunakan berbagai teori yang ada, dimana teori tersebut di anggap memiliki kaitan langsung dengan permasalahan, yang nantinya akan menjadi tujuan pembahasan penelitian. Oleh karena itu, perlu di

susun kerangka teori yang dapat memuat berbagai pokok pikiran yang menggambarkan dari sudut mana masalah dalam penelitian dalam skripsi ini akan disoroti.

Definisi teori yang dikemukakan oleh Marx dan Goodson yang menyatakan teori bahwa teori ialah aturan menjelaskan proposisi atau seperangkat proposisi yang berkaitan dengan beberapa fenomena alamiah dan terdiri atas representasi simbolik dari (1) Hubungan-hubungan yang dapat di amati diantara kejadian-kejadian (yang diukur), (2) Mekanisme atau struktur yang dapat diduduga mendasari hubungan-hubungan demikian, dan (3) Hubungan-hubungan yang disimpulkan serta mekanisme mekanisme dasar yang dimaksudkan untuk data dan yang diamati tanpa adanya manifestasi hubungan empiris apapun secara langsung.³

Dari segi fungsi teori menurut snelbeecker menyatakan ada empat fungsi teori, yaitu (1) Mensistematiskan penemuan-penemuan penelitian, (2) Menjadi pendorong untuk menyusun hipotesis dan dengan hepotesis membimbing peneliti mencarai jawaban-jawaban, (3) Membuat ramalan atas dasar penemuan, dan (4) Menyajikan penjelasan dan dalam hal ini untuk menjawab pertanyaan “mengapa”.⁴

Dalam penelitian ini, penulis menyertakan berbagai teori yang dianggap memiliki kaitan langsung dengan permasalahan dalam penelitiannya, yang

³Y. Snelbeecker, *Methodology of Science: A Philosophical Study*, Dordrecht, 1969, hal. 107

bertujuan untuk pemecahan permasalahan dalam penelitiannya. Adapun teori-teori menurut penulis yang relevan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Partai Politik

Secara umum partai politik dapat kita definisikan sebagai kumpulan orang-orang yang memiliki cita-cita dan tujuan yang sama yang terorganisir membentuk sebuah lembaga yang permanen untuk merebut kekuasaan yang sah untuk menjalankan program-programnya.

Menurut pasal 1 No. 2 tahun 2011 tentang partai politik. Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan dan kesatuan republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945, sedangkan definisi partai politik menurut para tokoh adalah sebagai berikut.

- 1) Menurut Raymond Girfield Gettel: Partai politik adalah *politicia science* terdiri dari sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir yang bertindak sebagai kesatuan politik dengan memakai kekuasaan memilih bertujuan

mengawasi pemerintahan dan melaksanakan kebijakan umum mereka.⁵

- 2) Carl J. Friedrich⁶: Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal serta material. (*A political party is a group of human beings, stably organized with government, with their further objective of giving to member of party, trough such control ideal and matrial benefits and advantages*)
- 3) Edmund Burke⁷: Partai politik adalah sekelompok manusia yang secara bersama-sama menyetujui prinsip-prinsip tertentu untuk mengabdikan dan melindungi kepentingan nasional.
- 4) Loen D. Epstein: Dalam bukunya *Political Parties in Western Democracies*⁸. Partai politik adalah satu kelompok pengejar kedudukan pemerintah, yang secara bersama-

⁵Soelistyati Ismail Gani, *Pengantar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Indonesia, Jakarta, 1987. hal 111-112

⁶Mirian Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008),. Hal.404

⁷Edmund Burke, *Reflections on the Revolution in France* (New York: Tappan, 1801) hal 103

sama terikat pada satu identitas ataupun label yang dimilikinya. Satu identitas, nama ataupun label politik, paling tidak bisa menunjukkan karakteristik partai politik itu sendiri, baik yang menyangkut besarnya, tingkat integritasnya, ataupun jumlah pendukungnya.

- 5) Sigmund Neuman⁹: Partai politik merupakan organisasi dari aktifitas-aktifitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang memiliki pandangan berbeda. Dalam hal ini partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintah resmi. *(A political party is the articulate organization of society's active political agents, those who are concerned ith the controle of governmental power and who compete for popular support with another group or groups holding divergent views)*
- 6) Giovanni sartoni¹⁰: Partai politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilih umum dan malalui

⁹Mirian Budiardjo, *Loc, Cit.* Hal.404

¹⁰Mirian Budiardjo, *Loc, Cit.* Hal.404

pemilihan itu, mampu menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan publik.

- 7) Menurut Mark M. Hagopian¹¹: Partai politik adalah suatu organisasi yang dibentuk untuk mempengaruhi bentuk dan karakter kebijakan publik dalam rangkaian prinsip dan kepentingan ideologi melalui praktek kekuasaan secara langsung atau partisipasi rakyat dalam pemilihan.

Dari pengertian partai politik menurut beberapa ahli maka dapat di simpulkan bahwa partai politik adalah sebuah organisasi yang di bentuk oleh sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dan memiliki tujuan yang sama untuk mencapai suatu kedudukan dalam sebuah pemerintahan. Sehingga munculnya partai politik bukanlah suatu hal yang dipaksakan sebab dengan adanya partai politik berarti seseorang mendapatkan kemudahan mencapai sebuah kedudukan dalam pemerintahan, dengan kata lain partai politik adalah alat untuk individu memperoleh dukungan dalam menduduki jabatan politik.

a. Fungsi Partai Politik

Sebagai wadah yang sangat kental dengan nuansa politik. Tentunya partai politik mempunyai segudang tugas sekaligus fungsi sebagai konsekuensi dari keberadaannya dalam masyarakat. Banyak sekali

interpretasi dan daftar pemikiran dari ilmuan politik yang berkaitan dengan fungsi partai politik, namun secara umum fungsi partai politik antara lain:

1) Representasi (perwakilan)

Kegiatan representasi dimaksudkan sebagai upaya mengartikulasikan kepentingan didalam dan melalui partai. Fungsi ini juga berwujud sebagai perantara yang merupakan ekspresi kepentingan kelompok yang diwakilinya, misalnya gereja, buruh, petani, dan sebagainya lewat kompromi atas kepentingan dan pendapat yang berbeda sehingga dapat diterima semua anggota.

2) Konversi dan Agresi

Proses konversi menyangkut proses transformasi dari kepentingan dan tuntutan untuk menjadi kebijaksanaan dan keputusan.

3) Integrasi (partisipasi, sosialisasi dan mobilisasi)

Integrasi merupakan kata utama dari varian fungsi-fungsi partai politik yaitu partisipasi, sosialisasi dan mobilisasi. Sosialisasi menyangkut proses transfer norma-norma sistem politik kepada masyarakat, mobilisasi merupakan variasi ekstrim dari sosialisasi berupa menanamkan kepentingan kepada sejumlah orang untuk menjamin terciptanya dukungan massa kepada partai politik maupun sistem politik secara keseluruhan. Sedangkan partisipasi

sendiri merupakan hasil dari mobilisasi dan sosialisasi. Massa diarahkan pada keyakinan bahwa partai merupakan medium ekspresi kepentingan dan proses partisipasi dalam penentuan kebijakan terbuka bagi semua pihak sehingga mampu mengintegrasikan individu kedalam sistem politik.

4) Rekrutmen

Merupakan kegiatan partai yang berkaitan dengan persiapan untuk mencari dan melatih pemimpin dalam pemilihan untuk mengisi jabatan dalam pemerintahan.

5) Pertimbangan

Perumusan kebijakan dan kontrol terhadap pemerintah. Partai politik memungkinkan terciptanya suasana perdebatan tujuan dan strategi yang dibuat oleh pemerintah lewat diskusi dan kompetisi antara pendapat-pendapat yang ada sehingga ada kebijakan yang bertentangan dengan kepentingan publik, partai politik akan menuntut proses pertimbangan kembali yang lebih terbuka untuk semua pihak.

6) Sarana untuk Mengatur Konflik

Tugas lain dari partai politik yaitu membantu merumuskan akar-akar pertikaian dan berusaha mengatasi konflik tersebut dengan mencari jalan tengah dari pendapat dan kepentingan yang

b. Tugas-Tugas Partai Politik

Adapun tugas-tugas partai politik adalah sebagai berikut:

- 1) Menjadi penghubung antara rakyat dan pemerintah. Partai politik disini bertugas untuk menampung semua pendapat dan keinginan rakyat atau khalayak ramai kemudian langkah selanjutnya ialah memilihnya dan merumuskannya serta menyerahkannya kepada pemerintah untuk dapat dijadikan politik yang akan diperjuangkan semaksimal mungkin.
- 2) Partai politik juga mempunyai tugas untuk menyebar luaskan gagasan-gagasan atau ide-ide yang tersimpul didalam rencana kebijaksanaan pemerintah.
- 3) Partai politik juga mempunyai tugas mendidik para warga negara menjadi orang yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai makhluk sosial.
- 4) Partai politik mempunyai tugas untuk menumbuhkan dan memupuk kesadaran akan loyalitas nasional
- 5) Partai politik bertugas mencari dan mengajak ikut serta mereka yang kelihatan dan dianggap berbakat dan mampu ikut serta dan relatif dalam lapangan kegiatan politik dan mendidik mereka untuk menjadi

- 6) Partai politik juga bertugas untuk mengatur pertikaian dan membantu merumuskan konflik-konflik dan selanjutnya berusaha untuk mengatasi konflik tersebut serta mencari penyelesaiannya.¹²

Ada dua fungsi utama partai politik pada dasarnya:

- 1) Mengumpulkan, mengorganisasi, dan merumuskan aspirasi rakyat untuk diperhatikan oleh sistem politik.
- 2) Menempatkan wakil-wakil yang dianggap cakap untuk mewujudkan aspirasi rakyat.

Sehubungan adanya pemisahan fungsi partai politik menurut bentuk negaranya maka penulis memilih fungsi partai politik¹³ sebagai berikut:

- a) Partai politik sebagai sarana sosialisai politik
- b) Partai politik sebagai sarana rekrutmen politik
- c) Partai politik sebagai sarana pengelola konflik
- d) Partai politik sebagai sarana komunikasi politik
- e) Partai politik sebagai sarana agregasi dan artikulasi kepentingan
- f) Partai politik sebagai sarana partisipasi politik¹⁴

¹² Soelistyati Ismail Gani, *OP. Cit.*, hal 113.

¹³ Muband Isman dan Lili Dauli, *Manajemen Partai Politik*, Laboratorium Ilmu Pemerintahan Fkipol

Untuk lebih memahami fungsi-fungsi partai politik yang ada maka penulis menjabarkan mengenai sedikit penjelasan fungsi partai politik sebagai berikut:

a) Partai politik sebagai sarana sosialisasi politik

Menurut seorang ahli sosiologi politik M. Rush (1992)¹⁵: Sosialisasi politik adalah proses yang melalui orang dalam masyarakat tertentu belajar mengenai sistem politiknya. Proses ini sedikit banyak menentukan persepsi dan reaksi mereka terhadap fenomena politik.

(Political socialization may be defined is the process by which individuals in a given society become acquainted with the political system in which to a certain degree determines their perceptions and their reactions to a political phenomena)

Sosialisasi politik¹⁶ menurut Dennis Kavanagh dan *Political Culture* menjelaskan bahwa sebuah proses untuk memasyarakatkan nilai-nilai politik kedalam suatu masyarakat.

Dari kedua pendapat para ahli diatas dapat kita ketahui inti dari sosialisasi politik adalah sebuah pengenalan politik

¹⁵Miriam Budiardjo, *Op.Cit.*hal.407

¹⁶Haryanto, *Partai politik Suatu Tujuan Umum*. Liberty yogyakarta,1984

kepada masyarakat dengan tujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai nilai-nilai politik, masalah politik, supaya masyarakat dapat memahami politik dan akhirnya mereka dapat berpartisipasi aktif dalam partai politik itu sendiri atau minimal mereka ikut partisipasi ketika pemilu. Dalam proses ini secara tidak langsung partai politik sudah melakukan fungsinya sebagai pendidikan politik karena partai politik melakukan sebuah proses transformasi pengetahuan kepada masyarakat. Di negara-negara berkembang kegiatan partai politik sebagai sarana sosialisasi politik bagi masyarakat, hanya sebatas pemberian pemahaman mengenai ideologi partai saja dan partai melakukan sosialisasi pada masyarakat pada saat mendekati pesta demokrasi. Padahal sosialisasi pada masyarakat itu adalah kegiatan yang harus dilakukan oleh partai politik secara berkelanjutan supaya memberikan kesadaran politik pada masyarakat yang berdampak pada keikutsertaan masyarakat dalam ranah politik baik sebagai pemangkas atau pun sebagai objek dalam kebijakan

b) Partai politik sebagai sarana rekrutmen politik.

Rekrutmen politik menurut Czudnowski adalah proses berhubungan dengan individu-individu atau kelompok individu yang dilantik dalam peran-peran politik aktif¹⁷. Czudnowski juga mengemukakan faktor yang mempengaruhi terpilih atau tidaknya seseorang dalam lembaga legislatif antara lain sebagai berikut:

- i. *Social Background*, artinya faktor ini berhubungan dengan pengaruh status sosial dan ekonomi keluarga di mana seseorang calon elit di besarkan.
- ii. *Political socialization*, dimana melalui sosialisasi politik seseorang menjadi terbiasa dengan tugas-tugas ataupun isu-isu yang harus dilaksanakan oleh suatu kedudukan politik.
- iii. *Initial political activity*, dimana faktor ini menunjuk kepada aktivitas atau pengalaman politik seorang calon elit selama ini
- iv. *Apprenticeship*, dimana faktor ini menunjuk langsung kepada proses “magang” dari calon elit ke

¹⁷Khoirudin, *Partai politik dan Agenda Transisi Demokrasi” Menakar Kinerja Partai Politik Era Transisi ke Demokrasi”*. Banteng: Balai Penerbitan Yogyakarta, 2004, hal. 101

elit lain yang sedang menduduki jabatan yang di incar oleh calon elit.

- v. *Occupational variables*, dimana di sini calon elit dilihat pengalaman kerjanya dalam lembaga formal yang belum tentu berhubungan dengan politik. Ini menjadi menarik sebab elit politik sebenarnya tidak sekedar dinilai dari popularitasnya saja namun dinilai pula faktor kapasitas intelektual, vitalitas kerja, latihan peningkatan kemampuan yang diterima, dan pengalaman kerja.
- vi. *Motivations*, dimana hal ini merupakan faktor yang paling penting, yakni melihat motivasi yang dimiliki oleh calon elit tersebut menduduki suatu jabatan tertentu.

Dapat disimpulkan bahwa rekrutmen politik merupakan sebuah proses dimana masyarakat mendaftarkan diri untuk menduduki suatu jabatan dalam pemerintahan. Selain itu dapat diartikan sebagai seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan

sejumlah peran dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintah pada khususnya.

c) Partai politik sebagai pengelola konflik.

Mengendalikan konflik melalui cara-cara berdialog dengan pihak yang berkonflik, menampung dan memadukan berbagai aspirasi dan kepentingan diri pihak-pihak yang berkonflik dan membawa ke parlemen untuk mendapatkan penyelesaian melalui keputusan politik.

d) Partai politik sebagai sarana komunikasi politik.

Komunikasi politik yaitu proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah. Partai politik sebagai sarana komunikasi politik harus dapat berperan sebagai penyalur aspirasi dari masyarakat kepada penguasa maupun kebijakan dari penguasa untuk masyarakat. Dari fungsi partai politik yang seperti demikian maka partai harus bersikap netral untuk meminimalisir kebijakan yang objektif dan memberatkan sebelah pihak.

- e) Partai politik sebagai sarana agregasi dan artikulasi kepentingan.

Artikulasi kepentingan adalah suatu proses penginputan berbagai kebutuhan, tuntutan dan kepentingan melalui wakil-wakil kelompok yang masuk dalam lembaga legislatif, agar kepentingan, tuntutan dan kebutuhan kelompoknya dapat terwakili dan terlindungi dalam pembuatan kebijakan publik.

Agregasi kepentingan merupakan cara bagaimana tuntutan-tuntutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok yang berbeda, digabungkan menjadi alternatif-alternatif pembuatan kebijakan publik.

Dapat disimpulkan bahwa agregasi dan artikulasi kepentingan adalah cara menyalurkan berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat dan mengeluarkan berupa keputusan-keputusan politik. Dengan adanya fungsi ini berarti partai politik sebagai media artikulasi dan agregasi kepentingan ikut membina kelangsungan kehidupan di negara yang menganut paham demokrasi. Sebab ini merupakan masukan masyarakat bagi sistem politik dan partai politik sendiri.

f) Partai politik sebagai sarana partisipasi politik.

Menurut Sudijono Sastroatmojo, partisipasi politik adalah kegiatan yang dilakukan warga negara untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah.¹⁸ Sedangkan menurut Huntington dan Nelson partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksudkan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah. Serta partisipasi masyarakat ini bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadic, secara damai atau kekerasan atau legal, efektif atau tidak efektif.¹⁹

Jadi partisipasi politik adalah keterlibatan individu dalam kegiatan yang ada dalam sistem politik. Selain itu partisipasi politik dapat kita definisikan sebagai kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan dalam ikut menentukan pimpinan pemerintah.

¹⁸ *Ibid*, hal 97

¹⁹ *Loc.Cit*.hal.97

Partisipasi politik sendiri terbagi menjadi dua jenis antar lain²⁰ :

- I. *Autonomous partisipation* adalah partisipasi dari masyarakat yang muncul dari dalam diri mereka sendiri berdasarkan kesadaran individu karena pendidikan tinggi, ekonomi yang cukup dan ketergantungan yang rendah.
- II. *Mobilized partisipation* adalah partisipasi yang di pengaruhi oleh pihak-pihak lain dan bukan karena kesadaran mereka sendiri, biasanya fenomena ini di sebabkan karena ketergantungan terhadap pemerintah yang tinggi, mendapat tekanan oleh pendidikan yang rendah. Dalam hal ini partai politik adalah wadah warga negara untuk berpartisipasi politik.

Berdasarkan komposisi fungsi anggotanya, partai politik digolongkan menjadi tiga, yaitu:

- 1) Partai massa (lindungan), yaitu partai politik yang hanya mengandalkan kekuatan massa pada keunggulan jumlah anggotanya dengan cara memobilisasi massa sebanyak-banyaknya, mengembang diri sebagai

pelindung bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat dimobilisasi untuk dapat memenangkan pemilu dan mendukung berbagai kebijakan tertentu.

2) Partai kader yaitu partai politik yang mengandalkan kualitas anggota, ketaatan organisasi dan disiplin anggota sebagai sumber kekuatan utama. Seleksi keanggotaan sangat ketat melalui kaderisasi yang berjenjang dan intensif serta penengakkan disiplin partai yang konsisten dan tanpa pandang bulu. Struktur organisasi sangat hirarkis sehingga jalur perintah dan tanggung jawab sangat jelas.

3) Partai Catch-All. Partai Catch-All Jenis partai ini merupakan penggabungan antara partai kader dan massa. Partai ini biasanya mengambil posisi kebijakan ditengah dari spektrum yang ada, sehingga partai politik ini memiliki tangkapan yang lebih luas karena menampung kelompok sosial dari sebanyak-banyaknya untuk menjadi anggotanya. Tujuannya memenangkan pemilu berkaitan dengan berkembangnya kelompok kepentingan dan penekan, dan ideologinya tidak terlalu kaku.. partai ini tidak mengandalkan ideologi namun kekuatan pada kuantitas basis massa meskipun

demikian mereka juga melakukan kaderisasi di internal elit pengurusnya, sehingga konsekuensinya adalah terbaikannya proses pendidikan politik.

Berdasarkan basis sosial dan tujuan, menurut Gabriel Almond partai politik terbagi menjadi :

- i. Partai politik yang beranggotakan berdasarkan lapisan-lapisan sosial dalam masyarakat seperti keatas, menengah dan kebawah.
- ii. Partai politik yang beranggotakan kalangan kelompok kepentingan seperti buruh, petani dan pengusaha.
- iii. Partai politik yang beranggotakan pemeluk agama tertentu seperti islam, katholik dan hindu.
- iv. Partai politik yang beranggotakan kelompok budaya tertentu seperti suku bangsa dan daerah tertentu.

Berdasarkan tujuan partai politik

- i. Partai politik perwakilan kelompok, artinya partai yang menghimpun berbagai kelompok masyarakat untuk memenangkan sebanyak mungkin kursi

- ii. Partai pembinaan bangsa, artinya partai yang bertujuan menciptakan persatuan nasional dan biasanya menindas kepentingan-kepentingan sempit.
- iii. Partai mobilisasi, artinya partai yang berupaya memobilisasi masyarakat kearah penyampaian tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh pemimpin partai, sedangkan partisipasi dan perwakilan kelompok cenderung diabaikan.

c. Tipologi Partai Politik.

Ada banyak definisi dan tipologi partai politik yang sering kita dengar seperti otoriter dan demokrasi, integrative dan representative, ideologis dan pragmatis, agamis dan sekuler dan sebagainya. Tentunya pembentukan tipologi partai ini dimaksudkan untuk mempermudah melakukan pembahasan fungsional tentang suatu partai politik dengan mempelajari karakteristik utamanya. Tipologi kepartaian setidaknya didasarkan pada.

1) Sumber Dukungan Partai

Berdasarkan pada pemahaman ini partai dibedakan menjadi partai komprehensif dan sectarian. Dikatakan komprehensif jika partai berusaha untuk mendapatkan suara dari warga negara, sedangkan partai sectarian adalah partai politik yang

menggunakan kelas seperti agama, daerah, ideologi sebagai nilai jual partai politik untuk memperoleh dukungan. Klasifikasi tidak sesuai dengan fakta sepenuhnya seperti partai sosialis religius yang sebenarnya sectarian pada kenyatannya tidak eksklusif dan partai-partai politik di Inggris dan Amerika yang secara komprehensif ternyata sulit untuk memperjuangkan kepentingan semua kelompok. Hal ini sehingga menyebabkan mereka terkadang harus mendiskriminasi pengikut mereka sehingga pada saat dan tingkat tertentu cenderung eksklusif.

2) Organisasi Internal

Tipe yang di maksud adalah bersifat tertutup dan terbuka. Partai tertutup memiliki keanggotaan yang terbatas atau mengenakan kualifikasi yang ketat kepada anggotanya. Sedangkan partai terbuka adalah yang membolehkan semua orang menjadi anggotanya. Partai tertutup sering dikaitkan dengan sifat otoriter dan cenderung menekankan aksi yang langsung diarahkan pada *control monopolistic* pemerintah, sedangkan partai terbuka lebih menekankan pada aksi politik dan menghormati aksi pluralisme.

3) Cara Bertindak dan Berfungsi

Pembadaan partai pada wilayah ini terbagi menjadi menyebar dan memusat. Partai yang menyebar cenderung menekankan

integrasi, pengawasan permanen, mobilisasi dan pembangunan institusi, sedangkan partai yang terspesialisasi menekankan pada perwakilan, agregasi, pertimbangan dan perumusan kebijakan. Partisipasi serta kontrol pemerintah untuk maksud dan periode tertentu.

2. Strategi

Strategi berasal dari bahasa Yunani "*Strategos*" (Stratos: militer dan pemimpin), yang berarti "*generalship*" atau sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal perang, jadi istilah strategi pada awalnya muncul pada dunia militer.

Menurut Arnold Steinberg, strategi adalah rencana atau tindakan. Penyusunan dan pelaksanaan strategi mempengaruhi sukses atau gagalnya strategi pada akhirnya.²¹

Dalam dunia keorganisasian strategi yang dicapai yaitu garis-garis perjuangan yang menyangkut pedoman dalam mencapai tujuan. Dalam kaitannya dengan program, istilah strategi ialah sebagai garis besar kebijaksanaan yang menyangkut kristalisasi, konsolidasi, dan kaderisasi. Strategi selalu memberikan "keuntungan" untuk mencapai tujuan dengan cara tersendiri "trik sendiri". Setidaknya taktik merupakan penjabaran operasional strategi.

²¹ Dika, TA. *Manajemen Teori-teori Politik*. Jakarta, 2005, hal. 261

Pengertian strategi menurut para ahli yaitu:

1) Kor Van Clauseditz

Strategi adalah suatu seni menggunakan pertempuran untuk memenangkan suatu perang, sedangkan taktik adalah seni menggunakan tentara dalam sebuah pertempuran baik dalam bisnis, politik atau strategi lainnya²².

2) Henry Mintzberg

Strategi merupakan serangkaian tindakan mendasar yang dibuat oleh jajaran organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan tertentu seperti visi pokok, analisis, identifikasi alternative, peluang, analisis kekuatan organisasi dan lain-lain²³.

3) Ricky Graffin

Strategi merupakan tulang punggung dari perencanaan dan batas untuk kegiatan operasionalnya hanya saja titik berat dari perencanaan strategi dan taktik yang digunakan²⁴.

Dengan melihat dari pengertian-pengertian tentang strategi menurut ahli di atas maka dapat di tarik kesimpulan bahwa bagaimana sebuah partai politik dalam melakukan tindakan dalam mencapai tujuan memerlukan strategi dalam operasinya agar taktik untuk

²² A. Sri Wahyuni, "Pengantar Proses Strategi Manajemen" hal. 26.

²³ Sondang P. Siagian, "Manajemen Strategi" hal 16-17.

²⁴ Sondang P. Siagian, "Manajemen Strategi" hal 16-17.

menguasai konstituen dapat berjalan dengan sempurna karena kekuatan musuh telah mampu dibaca kelemahan-kelemahannya.

Strategi merupakan suatu rencana untuk mencapai tujuan tertentu yang disusun sedemikian rupa untuk oleh suatu organisasi sesuai dengan misi yang hendak diraih, suatu strategi yang efektif harus memenuhi beberapa kriteria seperti yang dinyatakan oleh Bryson.²⁵

- 1) Strategi secara teknis harus dapat di kerjakan
- 2) Strategi secara politis dapat di terima oleh seluruh para stake holder
- 3) Strategi harus sesuai dengan filosofi dan nilai-nilai organisasi
- 4) Strategi sebaiknya bersifat etis, koral, legal dan merupakan keinginan organisasi untuk menjadi baik
- 5) Strategi harus sesuai dengan isu strategi yang hendak dipecahkan

a. Analisis SWOT

Menurut SWOT perencanaan strategi yang baik dalam dua bidang. Dalam bidang yang pertama, perencanaan strategi membuat gambaran yang jelas mengenai arah yang hendak dituju (visi) dan apa yang menjadi tujuan, dan alasan eksistensi organisasi tersebut, dalam gambaran ini mengembangkan tujuan yang merupakan hasil akhir dapat

diukur, serta sejauh mana organisasi itu mendekati visi dan tujuan utamanya atau malah menjauhinya.

Dalam bidang yang kedua, perencanaan strategi berusaha memperlihatkan realitas yang ada, dalam lingkup kerja suatu organisasi. Ada dua hal yang harus diperhatikan, yakni lingkup eksternal dimana wilayah yang pihak lain mempengaruhi atau dipengaruhi organisasi lain. Lingkup yang kedua adalah lingkup internal, yang terdiri dari atas sumber daya, kekuatan, berbagai kemungkinan serta tuntutan dari organisasi tersebut. Perencanaan strategi harus mampu melihat dan menilai kemungkinan dan ancaman yang terjadi dalam lingkup eksternal dan internalnya sehubungan dengan visi yang dimiliki, tugas serta tujuan akhir mereka.

Setelah memiliki visi, dengan memiliki satu komitmen menggapai tujuan dengan terlebih dahulu melakukan analisis terhadap lingkup yang ada, suatu organisasi harus mengembangkan pilihan strategis atau jalan alternatif guna menggapai tujuannya. Dengan membandingkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki organisasinya serta peluang dan ancaman dari luar organisasinya.

Ada empat kombinasi yang dapat dilakukan

- Strategi kekuatan-kemungkinan, artinya sejauh mana kekuatan dapat digunakan untuk memperoleh keuntungan dan berbagai

- Strategi kekuatan-ancaman, artinya sejauh mana kekuatan dapat digunakan mengatasi ancaman, yang dapat menghalangi pencapaian tujuan.
- Strategi kekuatan-kemungkinan, artinya sejauh mana kelemahan dapat diatasi untuk memperoleh keuntungan dari berbagai kemungkinan pengembangannya.
- Strategi kelemahan-kemungkinan, artinya bagaimana kelemahan dapat diatasi, untuk mengatasi ancaman, yang dapat menghalangi pencapaian tujuan.²⁶

b. Komunikasi Politik.

Membangun suatu *image* politik tidak dapat dilakukan tanpa adanya komunikasi politik. Komunikasi politik adalah suatu proses komunikasi yang memiliki implikasi atau konsekuensi terhadap aktifitas politik.²⁷ Komunikasi politik yang dimaksud dalam hal ini adalah semua hal yang dilakukan oleh kandidat untuk mentransfer sekaligus menerima umpan balik tentang isu-isu politik yang berdasarkan semua aktivitas yang dilakukannya terhadap masyarakat. Isu politik ini dilihat dalam perspektif yang sangat luas dan sangat terkait dengan usaha kandidat untuk memposisikan dirinya dan membangun identitas dalam rangka memperkuat *image*-nya dalam benak masyarakat; isu politik tersebut

²⁶ Peter Scholder, *Strategi Politik*, Jakarta, Friedrich-Naumann-Stiftung, PT Mita Alembana Grafika, 2003. Hal 20-26

²⁷ Ibid. Hal 10

dapat berupa ideologi partai, program kerja, figur pemimpin, latar belakang personal, visi dan misi serta permasalahan yang diungkapkannya.

Komunikasi dalam hal ini diartikan sebagai *diadic* yaitu komunikasi dua arah (Barry & Carnt, 1997). Dua arah berarti komunikasi yang tidak hanya dilakukan oleh kandidat kepada masyarakat, tetapi juga dari masyarakat kepada kandidat tersebut. Karena kondisi dari masyarakat yang beraneka ragam, tersebar dan terkadang tidak terorganisir, akan sulit membayangkan adanya sistematisasi komunikasi pesan yang dilakukan masyarakat kepada kandidat.²⁸ Hal ini membuat kandidat dan tim pemenangannya harus mengambil inisiatif untuk mentransfer sekaligus merumuskan signal-signal atau pesan yang disampaikan oleh masyarakat. Seringkali pesan-pesan tersebut harus melalui analisis dan pemahaman atas data dan fakta yang terbesar dalam banyak peristiwa. Kekecewaan, kebahagiaan, impian, kesedihan, tangisan, dan penderitaan masyarakat, baik yang sedang terjadi ataupun yang sedang kemungkinan akan terjadi, harus ditemukan dan dianalisis berdasarkan data dan peristiwa yang tercerai berai. Dalam hal ini, kandidat dan tim pemenangannya bertugas merangkum dan menganalisis pesan-pesan tersembunyi dibalik peristiwa yang terjadi. Tidak semua masyarakat memiliki kapasitas

untuk merumuskan apa yang menjadi permasalahan mereka yang sebenarnya, seringkali umpan balik yang mereka berikan lebih banyak tersirat dibandingkan tersurat.

c. Pemasaran Politik (*Political Marketing*).

Dalam kajian ilmu politik, *political marketing* menurut Firmanzah merupakan penerapan ilmu *marketing* dalam kehidupan politik. Dalam *political marketing*, yang ditekankan adalah penggunaan pendekatan dan metode *marketing* dalam menyusun produk politik, distribusi produk politik kepada publik serta meyakinkan bahwa produk politiknya lebih unggul dibandingkan dengan pesaing, sehingga membantu politikus dan partai politik untuk membangun hubungan dua arah dengan konstituen dan masyarakat.²⁹

Pandangan *political marketing* menurut Adman Nursal adalah strategi kampanye politik untuk membentuk serangkaian makna politis tertentu didalam pemikiran para pemilih. Serangkaian makna politis yang terbentuk dalam pemikiran para pemilih untuk memilih kontestan tertentu. Makna politis inilah yang menjadi output penting *political marketing* yang menentukan, pihak mana yang akan dicoblos pemilih.³⁰

Sedangkan menurut Hafied Cangara, pemasaran politik (*political marketing*) merupakan konsep yang diintroduksi dari

²⁹ Firmanzah, *Marketing Politik*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2012, hal. 128

³⁰ Adman Nursal, *Political Marketing Strategi Memenangkan Pemilu Sebuah Pendekatan Baru*
Kemampuan Pemilihan DPP, DPRD, Presiden, Jakarta : PT Gramedia, 2004, hal. 156

penyebaran ide-ide sosial dibidang pembangunan dengan meniru cara-cara pemasaran komersial, tetapi orientasinya lebih banyak pada tataran kesadaran, sikap dan perubahan perilaku untuk menerima hal-hal baru³¹. Dari konteks aktifitas politik, *political marketing* yang dimaksudkan adalah penyebarluasan informasi tentang kandidat, partai dan program yang dilakukan oleh aktor-aktor politik melalui saluran-saluran komunikasi tertentu yang ditujukan kepada segmen (sasaran) tertentu dengan tujuan mengubah wawasan, pengetahuan, sikap dan perilaku para calon pemilih sesuai keinginan pemberi informasi.

Dalam penerapannya *political marketing* telah menjadi suatu fenomena, tidak hanya dalam ilmu politik, tetapi juga memunculkan berbagai ragam pertanyaan para *marketer* yang selama ini sudah terbiasa dalam konteks dunia usaha. Tentunya terdapat beberapa asumsi-asumsi yang mesti dilihat dapat memahami *political marketing*, karena konteks dunia politik memang mengandung banyak perbedaan dengan dunia usaha. Politik berbeda dengan produk retail, sehingga akan berbeda pula muatan yang ada diantara keduanya, selain itu politik juga terkait erat dengan sebuah nilai (*value*). Jadi, isu politik bukan sekedar produk yang diperdagangkan, melainkan menyangkut pula keterikatan simbol dan nilai yang menghubungkan individu-individu. Dalam hal ini politik

lebih dilihat sebagai aktivitas sosial untuk menegaskan identitas masyarakat.

1) Segmentasi Pasar.

Segmentasi pasar adalah konsep yang sangat penting dalam aktifitas pemasaran. Tidak saja dalam konteks pasar tetapi juga untuk kegiatan kemasyarakatan atau kegiatan-kegiatan nirlaba lainnya.³² Tidak terkecuali dalam dunia politik, terlebih pada situasi dan kondisi dimana aktifitas politik berada dalam suasana demokratis. Dalam kondisi dan situasi seperti ini, hal penting yang wajib dipenuhi oleh seorang kandidat dan tim pemenangannya adalah kemampuan untuk mengemas dan mengkomunikasikan pesan politiknya yang disesuaikan dengan *audience* yang tepat. Karena *audience* sangat heterogen, maka kemudian mengelompokkan mereka berdasarkan kepada karakteristik tertentu, merupakan langkah yang paling strategis dalam rangka efektifitas dan efisiensi kegiatan komunikasi politik baik dalam aspek budged maupun capaian target.

Pengelompokan *audience* berdasarkan pada karakteristik tertentu dalam konsep pemasaran disebut sebagai segmentasi pemasaran. Umumnya segmentasi dapat didasarkan pada beberapa

³² Donald Kopp: *Membidik Pasar Indonesia Target Positioning Segmentasi*. Jakarta : PT Gramedia

kategori aspekual yakni: *Pertama*; Geografi. Masyarakat dapat disegmentasi berdasarkan geografi dan kerapatan (*density*) populasi. *Kedua*; Demografi. Masyarakat dapat dibedakan berdasarkan umur, agama, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, pekerjaan dan kelas sosial. Masing-masing kategori memiliki karakteristik yang berbeda tentang isu politik atau dengan yang lain. Sehingga perlu untuk dikelompokkan berdasarkan kriteria demografi. *Ketiga*; Psikografi. Dalam metode ini, segmentasi dilakukan berdasarkan kebiasaan, pola hidup, dan perilaku yang mungkin terkait dalam isu-isu politik. *Keempat*; Perilaku. Masyarakat dapat dibedakan dan dikelompokkan berdasarkan proses pengambilan keputusan, identitas ketertarikan dan keterlibatan dengan isu politik, loyalitas dan perhatian terhadap permasalahan politik. Masing-masing kelompok memiliki perbedaan, sehingga perlu untuk diidentifikasi. *Kelima*; Sosial Budaya. Pengelompokan masyarakat dapat dilakukan melalui karakteristik sosial dan budaya. Klasifikasi seperti suku, agama, etnis, dan ritual spesifik seringkali membedakan intensitas, kepentingan, dan perilaku terhadap isu-isu politik. *Keenam*; Sebab-akibat. Selain metode yang bersifat statis, metode ini mengelompokkan masyarakat berdasarkan perilaku yang muncul

dari isu-isu politik. Sebab-akibat ini melandaskan metode pengelompokan berdasarkan perspektif pemilih (*voters*).³³

2) Targeting Politik.

Targeting politik atau merupakan target *audiens* adalah tahap selanjutnya dari analisis segmentasi. Produk dari targeting adalah target *audiens* (kelayakan sasaran), yaitu; satu atau beberapa segmen masyarakat yang akan menjadi fokus kegiatan-kegiatan kampanye. Memang sebenarnya targeting adalah persoalan bagaimana memilih, menyeleksi, dan menjangkau masyarakat yang akan ditetapkan sebagai kelayakan sasaran kegiatan *political marketing*.

Targeting atau menetapkan sasaran adalah satu atau beberapa segmen yang akan dibidik untuk mencapai sasaran obyektif (segmentasi dasar).³⁴ Setidaknya ada tujuh pertanyaan yang harus disikapi dalam hal targeting, yaitu;

- i. Apakah masyarakat (*voters*) telah berubah dalam beberapa waktu terakhir?
- ii. Apakah target *audience* yang sesungguhnya sudah sesuai dengan yang direncanakan ? Mengapa berbeda?

³³ Firmanzah, *Op. cit.* hal. 193.

³⁴ Rhenald kasali. *Op. cit.* hal. 372-373.

- iii. Apa landasan/alasan memilih target *audience*/segmen tersebut?
Mengapa bukan target *audience* /segmen yang lain?
- iv. Apa yang membedakan target *audience*/segmen tersebut dengan target *audience*/segmen yang lain? Proses apa yang digunakan untuk menentukan target *audience*/segmen ini?
- v. Dapatkah membuktikan bahwa target *audience*/segmen tersebut potensial dan menguntungkan? Berapa lama membutuhkan waktu untuk menggerakkan target *audience*/segmen ini untuk memberi respon? Apakah lingkungan politik tidak berubah ketika saatnya memetik hasil?
- vi. Apakah yang akan dilakukan ketika target *audience*/segmen tidak merespons? Mengapa mereka tidak merespons?
- vii. Apakah ada target *audience*/segmen lain yang lebih menguntungkan?

Pertanyaan-pertanyaan diatas harus sudah disiapkan jawabannya sebelum mengeksekusi kegiatan political marketing. Banyak komunikator yang gagal karena mereka tidak menyiapkan langkah-langkah yang pas untuk membidik target *audience* atau segmen yang sangat potensial dan menguntungkan.

3) Positioning dan Bauran Produk Politik.

Positioning pada dasarnya merupakan strategi komunikasi untuk memasuki jendela otak pemilih agar seorang kandidat kepala daerah mengandung arti tertentu yang mencerminkan keunggulannya terhadap kandidat lain dalam bentuk hubungan asosiatif. Positioning efektif harus dilakukan berdasarkan analisis terhadap faktor eksternal dan internal organisasi, serta preferensi segmen pemilih yang menjadi sasaran utama yang diketahui dari hasil segmentasi.³⁵ Dengan melakukan positioning maka seorang kandidat berusaha untuk menjaga fokus pikiran, orientasi, dan kesadaran *voters* atau masyarakat untuk tetap mengingat serta mengarahkan refrensi utama tentang kandidat yang akan mereka pilih.

Positioning agar kredibel dan efektif harus dijabarkan dalam bauran produk politik. David Kurtz dalam bukunya *service marketing* mengungkapkan bahwa bauran produk politik merupakan kombinasi jasa yang ditawarkan kepada kelompok sasaran.³⁶ Jasa dalam *political marketing* diartikan sebagai kebutuhan produk politik yang diperlukan oleh lingkungan masyarakat. Penjabaran positioning dalam bauran produk politik meliputi:

³⁵ Toni Andrianus Pito, dkk., *Op. cit.* hal. 206.

³⁶ <http://www.temini-wordpress.com/2000/> (Diakses tanggal 22 september 2012)

- i. *Policy* adalah tawaran program kerja jika terpilih kelak. *Policy* merupakan solusi yang ditawarkan kandidat kepala daerah untuk memecahkan masalah kemasyarakatan berdasarkan isu-isu yang dianggap penting oleh para pemilih. *Policy* yang efektif sebaiknya mudah terserap pemilih dan menarik perhatian.
- ii. *Person* adalah profil dari kandidat kepala daerah yang akan dipilih melalui pemilu. Kualitas personal kandidat sangat mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihannya. Tentunya pemilih akan membandingkan figur dari masing-masing kandidat dan *track record* dari kandidat tersebut.
- iii. *Party* dapat juga dilihat sebagai substansi produk politik. Partai mempunyai identitas utama, aset reputasi, dan identitas estetik. Ketiga hal tersebut akan dipertimbangkan oleh para pemilih dalam menetapkan pilihannya. Oleh karena itu dalam *political marketing*, unsur-unsur tersebut harus dikelola dengan baik.

d. Proses Strategi Pendekatan Pasar.

Adman Nursal mengategorikan tiga pendekatan yang dapat dilakukan oleh kandidat dan tim pemenangannya untuk mencari dan mengembangkan pendukung selama proses kampanye politik:

1) Push Marketing

Menurut Nursal push-marketing adalah bagaimana penyampaian produk politik langsung kepada para pemilih. Dalam pendekatan ini kandidat berusaha mendapatkan dukungan melalui stimulasi yang diberikan kepada pemilih. Masyarakat perlu mendapatkan dorongan dan energi untuk pergi ke bilik suara dan mencoblos suatu kontestan. Disamping itu kandidat perlu menyediakan sejumlah alasan yang rasional maupun emosional kepada para pemilih untuk bisa memotivasi mereka agar tergerak dan bersedia memberikan dukungan. Tanpa alasan-alasan ini, pemilih akan merasa ogah-ogahan karena mereka tidak punya cukup alasan untuk menyuarakan aspirasi mereka. Namun pada dasarnya *push marketing* adalah usaha agar produk politik dapat menyentuh para pemilih secara langsung dengan cara yang lebih personal.³⁷

2) Pass Marketing

Strategi ini menggunakan individu-individu maupun kelompok yang dapat mempengaruhi opini pemilih (*influencer*). Sukses atau tidak penggalangan massa akan sangat ditentukan oleh pemilihan para *influencer* ini. Semakin tepat *influencer* yang terpilih, efek

³⁷ Adman Nursal, *Op. cit.*, hal. 242.

yang diraih pun akan menjadi semakin besar dalam mempengaruhi pendapat, keyakinan dan pikiran publik.³⁸

3) Pull Marketing

Menurut Nursal *pull-marketing* adalah bagaimana penyampaian produk politik dengan memanfaatkan media massa. Strategi seperti ini menitikberatkan pada pembentukan image politik yang positif. Robonowitz dan Machdonald, (1989) menganjurkan bahwa supaya simbol dan image politik dapat memiliki dampak yang signifikan, kedua hal tersebut harus mampu membangkitkan sentimen. Pemilih cenderung memilih partai atau kontestan yang memiliki arah yang sama dengan apa yang mereka rasakan.³⁹

e. Strategi Politik.

Pendekatan dan komunikasi politik perlu dilakukan oleh para kandidat dan tim pemenangannya untuk dapat memenangkan pemilu. Para kandidat perlu melakukan kajian untuk mengidentifikasi besaran (*size*) pendukungnya, massa mengambang dan pendukung kandidat lainnya. Identifikasi ini perlu dilakukan untuk menganalisis kekuatan dan potensi suara yang akan diperoleh pada saat pemilihan, juga untuk mengidentifikasi strategi pendekatan yang dilakukan terhadap

masing-masing kelompok pemilih. Strategi ini perlu dipikirkan oleh setiap kandidat, karena pesaing juga secara intens melakukan upaya-upaya untuk memenangkan persaingan politik.

Sementara itu, cara masyarakat menentukan pilihannya juga tergantung pada karakteristik masyarakat bersangkutan. Disatu sisi, terdapat kelompok masyarakat yang lebih menggunakan logika dan rasionalitas dalam menimbang kandidat. Kemampuan kandidat dalam memecahkan persoalan masyarakat menjadi titik perhatian kelompok masyarakat ini dipihak lain, kedekatan ideologis juga menjadi kekuatan untuk menarik pemilih kedalam bilik suara dan memilih kandidat yang memiliki paham sama. Pemilih jenis ini tidak begitu mempedulikan program kerja apa yang ditawarkan kontestan bersangkutan. Asal ideologi kandidat tersebut sama dengan ideologi pemilih, sudah cukup alasan baginya untuk memilih kandidat ini. Bauran antara karakteristik alasan yang dipakai untuk menentukan pilihan dengan segmen segmen pemilih dapat dilihat dalam tabel

Tabel 1.4
Jenis pemilih dan alasan memilih

	Pembagian Pemilih		
	Konstiuen	Non-partisan	Pendukung Lain
<i>Problem-sofing</i>	Penguatan dan proteksi secara rasional	Peyakinan secara rasional	Pengenalan dan merebut secara rasional
Ideologi	Penguatan dan proteksi secara ideologis	Peyakinan secara ideologis	Pengenalan dan merebut secara ideologis

Sumber: firmanzah (2012). Hal. 110

Konstituen, non-partisan dan pendukung pesaing membutuhkan pendekatan yang berbeda satu dengan yang lain. Konstituen adalah kelompok masyarakat yang diwakili dan memiliki kedekatan dengan suatu partai politik atau kandidat, kelompok masyarakat ini yang merupakan basis pendukung seorang kandidat. Konstituen memiliki loyalitas yang paling tinggi dibandingkan dengan jenis pemilih yang lain. Sementara non-partisan adalah massa mengambang yang masih belum memutuskan kandidat mana yang mereka dukung, non-partisan tidak mengikatkan diri dengan satu kandidat atau partai politik apapun. Biasanya jenis pemilih ini akan menjatuhkan pilihannya di akhir periode kampanye. Atau, mereka malahan tidak memilih siapapun karena mereka tidak melihat satupun dari pilihan kandidat yang sesuai dengan harapan mereka. Jenis pemilih terakhir adalah pendukung

kontestan lain. Seorang kontestan juga perlu mengembangkan hubungan dengan pendukung kandidat lain. Hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas dan situasi yang aman semasa periode kampanye. Selain itu, kesan positif perlu dimunculkan kepada pendukung lain, sehingga tidak tertutup kemungkinan pendukung lain akan beralih dan memberikan dukungannya kepada kandidat tersebut.

Strategi penguatan sangat dibutuhkan dalam hubungan antara kandidat dengan pemilih konstituen. Hal ini dilakukan agar ikatan baik diantara mereka yang bersifat rasional maupun emosional tetap terjaga sangat diharapkan ikatan politik antara kandidat dengan pemilih justru jadi sangat tinggi. Strategi penguatan ini dilakukan juga agar ikatan diantara mereka tidak melemah dan untuk menghindari masuknya pengaruh pesaing yang bisa menarik perhatian konstituen mereka. Pendekatan yang dipergunakan tentu saja berbeda tergantung pada apakah pemilih lebih mengedepankan aspek rasional atau ideologis. Kandidat perlu menggunakan penguatan yang bersifat rasional ketika mereka berhadapan dengan pemilih yang lebih mengedepankan *problem-solving*. Ketika kandidat harus berhubungan dengan pemilih yang lebih melandaskan alasan memilih pada aspek-aspek non-rasional, penguatan ideologi perlu dilakukan.

Strategi menanamkan keyakinan lebih sesuai untuk diterapkan

pada jenis pemilih yang non-rasional. Kepada jenis pemilih ini perlu

diyakini bahwa secara *problem-solving* atau pun ideologis, kandidat bersangkutan lebih baik dibandingkan dengan para pesaingnya. Strategi komunikasi dan penyajian informasi juga perlu dilakukan untuk meyakinkan para pemilih non-partisipan. Kandidat harus menarik mereka keluar dari kebimbangan. Hal ini sulit dilakukan tanpa adanya proses yang mencoba memberikan informasi dan meyakinkan non-partisipan untuk memberikan suaranya kepada seorang kandidat tertentu. Hal-hal yang hendak diyakinkan sangat tergantung pada karakteristik pemilih non-partisan ini.

Strategi pengenalan dan merebut dapat dilakukan kandidat kandidat terhadap jenis pemilih yang merupakan pendukung kandidat lain. Masing-masing kandidat berkepentingan untuk memperbesar porsi dukungan mereka, termasuk menggaet pendukung kandidat lain. Strategi pengenalan perlu dilakukan agar pendukung kandidat lain ini tidak memandang negatif dan tertarik untuk memberikan dukungannya. Selain itu, hal ini juga dimaksudkan untuk menciptakan iklim politik yang harmonis dan persaingan politik yang damai.

3. Pemilihan Umum.

Secara umum pengertian dari pemilihan umum yang sering di sebut dengan istilah pemilu adalah suatu cara untuk memilih wakil-wakil rakyat

a. Pengertian Pemilu

Adanya kaitan yang erat antara partai politik dan pemilihan umum disebabkan karena sistem pemilu ditata berdasarkan prinsip demokrasi yaitu “persamaan kesempatan kepada semua kontestan”, hal ini dapat disimpulkan bahwa sistem pemilihan merupakan faktor penting yang menentukan tipe sistem kepartaian. Kaitan yang erat antara parpol dengan pemilu antara lain ditunjukkan oleh Maurice Duverger⁴⁰, ia menyatakan pendapatnya bahwa partai politik dan pemilihan merupakan dua realitas yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, dan bahkan kadang-kadang sulit pula untuk memisahkan guna keperluan analisa, sebagai contoh tingkat ketepatan dalam badan perwakilan rakyat tergantung pada sistem pemilihan dan sistem kepartaian.

Sedangkan partai politik yang demokratis dalam menghubungkan rakyat dengan proses politik adalah dengan melalui pemilihan umum akan dapat terselenggara hanya dengan adanya partai-partai politik. Dimana dalam hal ini partai berkedudukan sebagai kontestan pemilihan umum, Harris G. Warren dan kawan-kawannya mengemukakan pendapatnya bahwa:

“Elections are the occasions when citizens choose their officials and decide what they want the government to do. In making these decisions, citizens determine what rights they want to have and keep”⁴¹.

Apa yang dikemukakan oleh Warren dan kawan-kawannya tersebut pada intinya lebih kurang menyatakan bahwa pemilu adalah merupakan kesempatan bagi para warga Negara untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah dan memutuskan apakah yang mereka inginkan untuk dikerjakan oleh pemerintah. Dan dalam membuat keputusan itu mereka menginginkan untuk dimiliki.

Sehubungan dengan pemilu, A. Sudiharto Djiwandono mengemukakan pendapatnya bahwa:

Pemilu adalah sarana demokrasi yang penting, ia merupakan perwujudan nyata keikutsertaan rakyat dalam kehidupan kenegaraan⁴². Pada saat sekarang ini memang tidak dimungkinkan rakyat untuk terlibat secara langsung dalam kehidupan kenegaraan. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya jumlah penduduk suatu negara, sehingga tidak dimungkinkan untuk melibatkan mereka seluruhnya secara langsung dalam kehidupan kenegaraan.

⁴¹ Harris G. Warren, et al, *Our Democracy at Work*, Prentice Hall, Inc. Englewood Cliffs, N.J., 1963, hal. 67.

⁴² A. Sudiharto Djiwandono, *Demokrasi dan Pembangunan*, Jakarta, 1962, hal. 102.

Bagi Indonesia, pemilihan sistem pemilu⁴³ *distrik* sebagai aspek reformasi politik menuju demokrasi, didasarkan kepada peluang yang diberikannya untuk menghilangkan kelemahan sistem pemilu proporsional, baik secara langsung maupun dampak tidak langsung. Langkah ini perlu diambil, karena penyalahgunaan sistem pemilu proporsional sudah membangun jaringan dan *kultur vested interest*, sehingga amat sukar dihilangkan melalui revisi sistem itu sendiri. Kendatipun penggunaan sistem distrik merupakan reformasi mendasar, akan tetapi itulah cara untuk menghilangkan penyalahgunaan sistem pemilu proporsional yang bersifat mendasar, sehingga hakekat sistem itu hilang dalam praktiknya, sebagaimana dibuktikan oleh mandulnya sistem pemerintahan perwakilan yang *otoritarian* atau *demokrasiformalitas*⁴⁴. Pemilu diselenggarakan secara demokratis, dan transparan, berdasarkan asas jujur, langsung, umum, bebas dan rahasia. Sedangkan yang dimaksudkan dengan asas pemilu dijelaskan dalam UU No. 8 tahun 2012 adalah:

1) Langsung

Rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nurani, tanpa perantara.

⁴³ Sd Subhan "Langkah Merah" Benteng Budaya, Yogyakarta, 1996, hal.54.

⁴⁴ Aki Sanit, Reformasi Politik Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998, hal. 02

2) Umum

Pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan minimal dalam usia, yaitu sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah kawin berhak ikut memilih dalam Pemilihan Umum. Warga negara yang sudah berumur 21 (dua puluh satu) tahun berhak dipilih. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa diskriminasi (pengecualian) berdasar acuan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan dan status social.

3) Bebas

Setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Didalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.

4) Rahasia

Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada saat pemilu dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa suaranya diberikan. Asas rahasia ini tidak berlaku lagi bagi pemilih yang telah keluar dari

tempat pemungutan suara dan secara sukarela bersedia mengungkapkan pilihannya kepada pihak manapun.

5) Jujur

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, penyelenggaraan/ Pelaksanaan Pemerintah dan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, Pengawas dan Pemantau Pemilihan Umum, Termasuk Pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

6) Adil

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, setiap pemilih dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

E. Definisi Konsepsional

Definisi konsepsional adalah usaha untuk menjelaskan mengenai pembatasan pengertian mengenai konsep yang satu dengan yang lainnya agar tidak terjadi kesalah pahaman. Di gunakan konsep ini dimaksudkan untuk menggambarkan secara tepat fenomena yang hendak diteliti. Konsep ini juga digunakan untuk menggambarkan secara abstrak tentang kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian dalam ilmu sosial⁴⁵.

⁴⁵ K. J. Giddens, *Strukturisme Metode Penelitian Sosial*, 1975, Jakarta, 1992, hal. 24

1. Partai politik merupakan kumpulan individu yang mempunyai tujuan, visi, dan misi yang sama untuk mencapai sebuah kedudukan dalam pemerintahan.
2. Pemilu adalah proses demokrasi baik di pusat maupun daerah yang bertujuan untuk memilih kepala daerah maupun wakil rakyat secara langsung dalam jangka waktu yang ditentukan
3. Demokrasi adalah pemerintahan yang dijalankan berdasarkan kedaulatan rakyat yaitu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.
4. Strategi adalah langkah-langkah taktik yang dilakukan oleh kandidat maupun partai politik dengan mengoptimalkan kemampuan atau potensi yang dimiliki untuk ikut persaingan memperoleh suara terbanyak serta mendapatkan kemenangan pada pemilihan umum baik legislatif maupun pemilukada
5. Strategi adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh partai politik untuk mengoptimalkan kemampuan dan potensi yang dimiliki untuk mempertahankan suara konstituen yang telah dimiliki.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan unsur sebagai bagian dari penelitian yang memberikan pengertian bagaimana caranya untuk mengukur suatu variabel. Dengan kata lain, definisi operasional adalah suatu informasi

ilmiah yang sangat membantu peneliti lain yang ingin menggunakan variabel yang sama⁴⁶.

Dengan demikian agar suatu penelitian dapat diukur variabelnya maka dapat dioperasionalkan terlebih dahulu. Untuk itu penulis mempergunakan variabel-variabel dalam penelitian; yaitu:

1. Strategi Dewan Pimpinan Daerah PDI-Perjuangan dalam menjaga

basis suara antara lain sebagai berikut:

- A. Melakukan Analisis SWOT
- B. Membentuk Image Politik.
- C. Melakukan Komunikasi Politik
- D. Melakukan pemasaran politik (*political Marketing*)
- E. Melakukan Strategi Pendekatan Pasar
- F. Melakukan Kampanye Politik
 - 1) Gerakan "Door to Door"
 - 2) Pendekatan Tokoh
 - 3) "*show of Force*" (simpatik)
 - 4) Membantu Regu Penggerak

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini merupakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Hadari Nawawi, metode penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan objek penelitian seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagai mana adanya. Penelitian deskriptif melakukan analisa dan menyajikan data-data dan fakta-fakta secara sistematis sehingga dapat di pahami dan disimpulkan⁴⁷.

Dengan demikian jenis penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang membuat deskriptif atau gambaran secara sistematis dan aktual mengenai serangkaian peristiwa faktual yang terjadi.

2. Lokasi Penelitian

Untuk mendapat informasi yang berhubungan dengan masalah penelitian ini, maka penulis melakukan penelitian di Daerah Istimewa Yogyakarta tepatnya di kantor Dewan Pimpinan Daerah PDI-Perjuangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada tanggal 13 januari 2013

3. Unit Analisa Data

Sehubungan penelitian ini mengkaji tentang pelaksanaan fungsi partai politik maka unit analisa dalam penelitian ini adalah.

- a. Pengurus Dewan Pimpinan Daerah PDI-Perjuangan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Simpatisan PDI-Perjuangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Jenis Data

Dalam mengumpulkan data dan informasi, sumber data yang di gunakan ada dua macam yaitu.

- a. Data primer merupakan suatu data yang dikumpulkan ketika penelitian dalam hal ini data-datanya berkaitan tentang pelaksanaan fungsi partai politik yang diperoleh langsung dari pengurus DPD PDI-Perjuangan berupa jawaban terhadap pertanyaan didalam kuisisioner. Data ini penulis peroleh dari hasil pengamatan, survei serta wawancara atau memberi daftar pertanyaan langsung dari lapangan. Tetapi dalam penelitian ini pencarian data akan ditekankan pada penggunaan wawancara.
- b. Data sekunder adalah data pendukung untuk melengkapi data primer seperti dari buku-buku, makalah jurnal, dan pendukung lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan adapun data sekunder yang penulis pergunakan adalah dokumen-dokumen, artikel, foto-foto sebagai bukti kegiatan tersebut telah di laksanakan oleh

partai politik Dewan Pimpinan Daerah PDI-Perjuangan Daerah Istimewa Yogyakarta serta buku-buku acuan yang berkaitan dengan pelaksanaan strategi partai politik

H. Teknik Pengumpulan Data

Dalam sebuah penelitian, tahapan pertama yang perlu dilakukan oleh peneliti adalah pengumpulan data. Data merupakan bukti kongkrit, keterangan atau informasi mengenai segala hal yang berkaitan tujuan penelitian. Ada beberapa metode yang digunakan untuk mengumpulkan data antara lain, metode dokumentasi; dan penelitian lapangan, seperti wawancara dan observasi⁴⁸.

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu instrumen dalam penelitian. Dengan wawancara, peneliti dapat mengetahui berbagai informasi. Wawancara dilakukan dalam bentuk pertanyaan yang mendalam dengan menggunakan interview guide atau secara bebas dan spontan. Maka dalam wawancara mendalam tersebut, terlebih dahulu penulis memerlukan sebuah pedoman wawancara yang harus sesuai dengan tujuan penelitian skripsi ini⁴⁹.

⁴⁸Tatang M Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hal.130

⁴⁹Ida Bagus Murti, *Filosofi Penelitian & Metode Penelitian Sosial*, Pustaka Beladina, Yogyakarta

Teknik ini digunakan peneliti untuk mengetahui secara langsung berbagai bentuk persepsi, pendapat, dan penilaian khusus dari beberapa nara sumber yang dianggap penulis mempunyai kompetensi sebagai sumber informasi mengenai penelitian ini. Penulis melakukan wawancara kepada struktur pengurus Dewan Pimpinan Daerah PDI-Perjuangan antara lain sebagai berikut; Wakil Ketua Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga Esti Wijayanti. Wakil Ketua Bidang Keanggotaan, Kaderisasi dan Rekrutmen Y Widi Pratomo, .SE. DPRD kabupaten Bantul Fraksi PDI-Perjuangan Ispriyatun, Simpatisan PDI-Perjuangan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tujuannya ialah mendapatkan informasi yang jelas dari nara sumber yang mempunyai peran kunci dalam permasalahan dipenelitian skripsi ini.

2. Dokumentasi

Penggunaan dokumentasi dalam penelitian ini adalah untuk mendukung dan menambah bukti dari sumber-sumber lain. Maka semua itu diperoleh dari dokumen, catatan, arsip, maupun risalah yang dimiliki unit-unit analisa dalam penelitian ini. Penelusuran yang sistematis terhadap dokumen yang sangat relevan sangat di butuhkan.

Dokumentasi sebuah penelitian sangat di perlukan untuk memperkuat dan menjadi bukti nyata penelitian. Dokumentasi dapat

a. Notulensi

Mencatat semua data yang dapat memperkuat hasil penelitian. Data yang dimaksud adalah data hasil wawancara.

b. Pemberitaan di Media Massa

Pemberitaan di media massa yang dimaksud adalah segala tulisan atau informasi mengenai pelaksanaan fungsi partai yang dijalankan oleh Dewan Pimpinan Daerah PDI-Perjuangan yang dimuat atau diberitakan di media massa, seperti di koran, artikel, iklan dll.

I. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperoleh cukup memadai untuk mendukung proses analisis, maka tahap selanjutnya adalah analisis data. Dalam analisis data ini data yang dikumpulkan akan diolah dan kemudian dianalisis selanjutnya untuk dapat dirumuskan.

Analisis data menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dalam satuan uraian dasar. Ia membedakannya dengan penafsiran, yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan diantara dimensi-dimensi uraian. Sedangkan analisis data menurut Bodgan dan Taylor sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk

menemukan tema dan merumuskan masalah hipotesis seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis itu⁵⁰.

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian skripsi ini ialah penelitian bersifat deskriptif yang bertujuan untuk dapat memberikan gambaran mengenai situasi atau kejadian yang terjadi. Adapun langkah-langkah dalam analisis data kualitatif yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses penyederhanaan data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Data-data yang diperoleh dikelompokkan untuk memudahkan proses penelitian.

2. Penyajian Data

Data-data yang telah dikelompokkan kemudian disajikan. Penyajian disini dimaksudkan sebagai kumpulan informasi tersusun yang kemungkinan akan ada penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Hal itu bermaksud akan sangat mudah memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang diperoleh.

3. Menarik Kesimpulan

Dengan memperoleh data-data yang akurat yang telah melalui proses reduksi dan penyajian tadi maka nantinya penulis akan memperoleh

⁵⁰Lexy J. Moeleong, *Op.Cit*, hal.103

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

1. Kondisi Umum

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan wilayah setingkat provinsi terkecil kedua setelah provinsi DKI Jakarta dan terletak di tengah Pulau Jawa, dikelilingi oleh Provinsi Jawa Tengah dan termasuk zona tengah bagian selatan dari formasi geologi Pulau Jawa. Di sebelah selatan terdapat garis pantai sepanjang 110 km berbatasan dengan Samudera Indonesia, di sebelah utara menjulang Gunung Merapi (± 2.968 m), salah satu dari gunung yang paling aktif di dunia. Luas keseluruhan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah 3.185,80 km² atau kurang lebih 0,15% luas daratan Indonesia. Di sebelah barat mengalir Sungai Progo, yang berawal dari Jawa Tengah, dan Sungai Opak di sebelah timur yang berawal dari Gunung Merapi yang bermuara di laut selatan.

Ibu kota Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Kota Yogyakarta. Kota-kota lainnya adalah Bantul, Wates, Sleman dan Wonosari. Secara administratif Daerah Istimewa Yogyakarta dibagi dalam satu kota dan empat kabupaten, dimana Kota Yogyakarta membentuk kesatuan administrasi sendiri. Jarak ke ibu kota negara Jakarta adalah 600 km. Kota